



## **WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK): EVALUASI DAMPAK DAN ALTERNATIF KEBIJAKAN**

Masyithah Aulia Adhiem\*

### Abstrak

*Tantangan pencapaian cita-cita swasembada pangan nasional dari sektor peternakan saat ini dihadapkan pada ancaman wabah PMK. Tulisan ini mencoba melihat dampaknya dan mengevaluasi serta memberikan alternatif kebijakan untuk mendukung kebijakan mitigasi yang sudah diterapkan. Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk mengatasinya, seperti vaksinasi, penutupan lalu lintas hewan, dan impor. Guna meningkatkan vaksinasi hewan ternak dibutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengedukasi peternak dan tenaga vaksinator. Penutupan lalu lintas hewan harus dibarengi dengan penegakan hukum dan rencana yang matang untuk menjaga arus distribusi. Rencana impor sapi juga harus dipastikan tidak merugikan peternak lokal dan kuotanya berdasarkan perhitungan yang cermat. Ketiga kebijakan tersebut juga perlu dibarengi kebijakan pendamping lainnya. Komisi IV DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasannya dapat mendorong mitra kerja terkait untuk mengevaluasi kebijakan tersebut secara berkala, dan mendorong kerja sama seluruh pemangku kepentingan. Selain itu juga memastikan perlindungan kesejahteraan peternak dalam penerapan seluruh kebijakan.*

### **Pendahuluan**

Saat ini terjadi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang mengancam produksi di sektor peternakan. Wabah PMK kembali merebak dan menyerang hewan ternak di beberapa daerah. Di Indonesia, setelah sebelumnya 30 tahun bebas PMK, wabah PMK merebak kembali pada tahun 2022 dan terus mewabah hingga akhir tahun 2024 lalu (Kompas, 2025). PMK yang kembali terjadi di awal tahun 2025 dikhawatirkan berbagai pihak belum akan mereda hingga Maret 2025 mendatang.

Wabah PMK menyebabkan penurunan produksi susu, berat badan ternak, dan gangguan reproduksi. Hal tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi (Grehenson, 2025). Meskipun nilai nominal Produk Domestik Bruto (PDB) subsektor peternakan meningkat dari Rp232,27 triliun pada 2018 menjadi Rp298,01 triliun pada 2021, kontribusinya terhadap PDB nasional relatif stagnan di kisaran 1,5% (Ditjen PKH, 2023). Secara ekonomi, kerugian akibat PMK diperkirakan mencapai Rp40 triliun, yang mencakup penurunan produksi, pembatasan pergerakan ternak, dan biaya pengendalian penyakit (Revanda, 2025).

\*) Analis Legislatif Ahli Muda Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: masyithah.adhiem@dpr.go.id

Pemerintah telah mengambil berbagai tindakan mitigasi atas merebaknya kasus ini, seperti pemberian vaksin, penghentian lalu lintas ternak di daerah terjangkit, dan rencana impor untuk mengatasi kekurangan pasokan. Tulisan ini mengkaji dampak wabah PMK, mengevaluasi efektivitas berbagai kebijakan yang telah diterapkan, serta memberikan alternatif kebijakan guna meningkatkan efektivitas penanganan wabah PMK, baik dalam situasi saat ini maupun di masa mendatang.

## **Perkembangan dan Dampak Wabah PMK di Indonesia**

Penyakit mulut dan kuku (PMK) adalah penyakit virus akut yang menyerang hewan berkuku belah, seperti sapi, kambing, domba, dan babi. Penyebabnya adalah virus asam ribonukleat (RNA) dari genus *Aphthovirus*, famili *Picornaviridae*. Penyakit ini sangat menular dengan tingkat morbiditas tinggi, tetapi umumnya tingkat mortalitasnya rendah. Penularan terjadi melalui kontak langsung dengan hewan terinfeksi, cairan tubuh, udara, serta kontaminasi pada pakan dan peralatan. Gejala klinis meliputi demam tinggi, lesi vesikular di mulut, lidah, kuku, dan ambing, serta hipersalivasi (World Organisation for Animal Health, n.d.). Pada sapi, gejala umum yang terlihat antara lain pincang dan penurunan produksi susu.

Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa antara 28 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025, tercatat 27.241 kasus PMK di 2.907 desa, dengan 832 ternak mati dan 387 ekor dipotong paksa. Sejak Desember 2024 hingga 20 Januari 2025, PMK telah menyebar ke 17 provinsi dan 121 kabupaten/ kota (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2025). Jumlah ternak yang terdampak diprediksi akan terus bertambah. Hal tersebut terlihat dari laporan berbagai daerah, seperti misalnya di Lumajang yang mencatat adanya 160 kasus baru selama sepekan dengan kematian sebanyak 7 ekor sapi (Huda & Rastika, 2025).

Penurunan produksi ini berdampak langsung pada pendapatan peternak, terutama mereka yang bergantung pada ternak sebagai sumber utama mata pencaharian. Selain itu, harga jual ternak di tengah wabah mengalami penurunan drastis akibat menurunnya permintaan konsumen yang khawatir terhadap kualitas dan keamanan produk ternak. Hal ini mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar bagi peternak dan pedagang hewan. Selain mengakibatkan penurunan produksi, larangan perdagangan internasional untuk wilayah yang terjangkit PMK, dan menimbulkan tambahan beban biaya pengendalian wabah (Food and Agriculture Organization, n.d.)

Kerugian ekonomi juga disebabkan oleh penurunan produktivitas tenaga kerja di sektor peternakan. Peternak yang kehilangan ternaknya atau mengalami penurunan produksi harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pemulihan, seperti pengobatan ternak dan penerapan biosekuriti yang lebih ketat.

Peternak kecil yang kehilangan sumber pendapatan utama mereka rentan jatuh ke dalam kemiskinan, yang dapat meningkatkan ketidakstabilan sosial di pedesaan. Selain itu, wabah PMK menciptakan eksternalitas yang memengaruhi sektor lain, seperti industri pengolahan daging dan susu, serta sektor pariwisata yang terkait dengan peternakan.

### **Kebijakan Mitigasi Wabah PMK**

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi wabah PMK. Salah satunya adalah program vaksinasi massal yang menargetkan 4 juta dosis vaksin, dengan prioritas pada daerah dengan tingkat infeksi tinggi, terutama di Pulau Jawa (“Penyakit Mulut dan Kuku Mewabah Kembali”, 2025; Ditjen PKH, 2024). Kebijakan pengendalian PMK lainnya yaitu pengobatan ternak yang sakit, disinfeksi, investigasi, dan edukasi kepada pihak terkait (Ditjen PKH, 2025). Adapun terkait anggaran, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp104 miliar untuk mendukung pelaksanaan program vaksinasi di zona pemberantasan PMK (Grehenson, 2025).

Kendala yang masih dihadapi adalah keengganan para peternak untuk memberikan vaksin pada ternak mereka karena kekhawatiran dapat menyebabkan kematian. Selain itu, jumlah vaksinator yang sangat terbatas di daerah juga menjadi tantangan penerapan kebijakan ini. Guna meningkatkan efektivitas kebijakan vaksinasi maka pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak. Perguruan tinggi berperan penting dalam menyediakan penyuluh untuk memberikan edukasi kepada para peternak maupun bantuan sebagai tenaga vaksinator. Pemerintah daerah, termasuk kepala desa, juga dapat secara aktif mendorong warganya yang memiliki ternak untuk melakukan vaksinasi melalui pemberian insentif. Hal ini tentunya membutuhkan perencanaan matang untuk memastikan kecukupan anggaran.

Pencegahan penyebaran wabah juga dilakukan dengan menutup lalu lintas hewan ternak, salah satunya menutup pasar hewan, terutama di daerah yang terjangkit. Kebijakan tersebut merupakan langkah penting untuk mencegah penyebaran wabah ke daerah lain. Namun pemerintah perlu mewaspadaai masih adanya “jalan tikus” perdagangan hewan ternak yang umumnya tidak terawasi. Hal ini membutuhkan koordinasi banyak pihak, antara lain dengan penegak hukum dan badan karantina di berbagai daerah. Diperlukan penegakan hukum yang menimbulkan efek jera untuk mencegah transaksi hewan melalui jalur-jalur yang tidak seharusnya.

Wabah PMK tentunya juga mengakibatkan berkurangnya produksi daging dan susu, terlebih saat ini sudah berjalan program makan bergizi gratis dan mendekati berbagai hari besar keagamaan. Selain itu, adanya target swasembada pangan juga akan turut dipengaruhi oleh stabilitas produksi sektor peternakan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah membuka keran impor sapi bakalan pada tahun 2025 untuk memenuhi kebutuhan daging dan susu dalam negeri. Hal yang harus menjadi perhatian adalah kepastian keamanannya.

Pemerintah dan para importir harus memastikan bahwa negara asal sapi merupakan negara yang bebas dari PMK ataupun penyakit hewan ternak lainnya. Selain itu, harus dipastikan bahwa lahan pakan yang ada dapat mencukupi. Pemerintah perlu melakukan pendataan dan penghitungan yang tepat dalam menentukan kuota impor terutama kaitannya dengan ketersediaan lahan pakan dan kepastian penyerapan atas produksi lokal.

Hal lain yang juga penting adalah perlindungan kesejahteraan peternak. Ketika terjadi wabah maka peternak terancam kehilangan sumber pendapatan utama mereka sehingga dibutuhkan asuransi sebagai jaring pengaman untuk dapat melanjutkan kegiatan produksinya. Pemerintah perlu terus menyosialisasikan pentingnya asuransi ternak. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk dapat membantu pembayaran premi bagi peternak, terutama peternak berskala kecil. Mekanisme penganggaran dapat dilakukan dengan skema yang ada, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tantangan perubahan iklim juga tetap memerlukan perhatian. Semua pihak harus tetap membangun kewaspadaan terhadap potensi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor akibat peningkatan curah hujan yang dapat mengancam keselamatan ternak. Selain itu juga dibutuhkan antisipasi bencana kekeringan yang akan berdampak pada kekurangan lahan pakan ternak.

## Penutup

Wabah PMK menjadi salah satu hambatan utama dalam mencapai target pertumbuhan populasi ternak dan penurunan produksi. Secara keseluruhan, wabah PMK memberikan dampak negatif yang luas terhadap sektor peternakan, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu dari semua pihak mengendalikan penyebaran PMK dan memitigasi dampaknya, sehingga tujuan swasembada pangan nasional dapat tercapai. Perencanaan kebijakan jangka panjang terhadap penanganan wabah PMK juga diperlukan untuk mengantisipasi risiko di masa mendatang.

Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI melalui Komisi IV dapat mendorong seluruh mitra kerja terkait untuk secara berkala memberikan evaluasi terhadap kebijakan yang telah ditempuh dalam menangani PMK. Pelaksanaan vaksinasi harus terus dilanjutkan untuk mencegah perluasan wabah. Mitra terkait juga perlu mengantisipasi dampak atas gangguan distribusi sumber pangan akibat penutupan lalu lintas hewan. Hal penting lainnya adalah memastikan kesejahteraan peternak di tengah rencana importasi sapi.

## Referensi

- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan [Ditjen PKH]. (2025, 21 Januari 2025). *Perkembangan kasus PMK di Indonesia*. Ditjen PKH Kementerian Pertanian. <https://ditjenpkh.pertanian.go.id/pages/59-perkembangan-kasus-pmk>.

- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan [Ditjen PKH]. (2024, September 19). *Kementan perkuat strategi pembangunan peternakan 2025 bersama dinas seluruh Indonesia*. Ditjen PKH Kementerian Pertanian. <https://ditjenpkh.pertanian.go.id/berita/1996-kementan-perkuat-strategi-pembangunan-peternakan-2025-bersama-dinas-seluruh-indonesia?utm>.
- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan [Ditjen PKH]. (2023). *Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2023*. Ditjen PKH Kementerian Pertanian. [https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Buku\\_Statistik\\_2023\\_ISSN.pdf?utm](https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Buku_Statistik_2023_ISSN.pdf?utm).
- Food and Agriculture Organization of The United Nations. (n.d.). *Foot and mouth disease*. Diakses pada Januari 21, 2025, dari <https://www.fao.org/animal-health/animal-diseases/foot-and-mouth-disease/en>.
- Grehenson, G. (2025, Januari 19). *Penanganan wabah PMK butuh perhatian serius*. Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/penanganan-wabah-pmk-butuh-perhatian-serius>.
- Huda, M. & I. Rastika. (2025, Januari 21). Kasus PMK di Lumajang bertambah 160 dalam seminggu, 7 sapi mati. *Kompas.com*. <https://regional.kompas.com/read/2025/01/21/181940878/kasus-pmk-di-lumajang-bertambah-160-dalam-seminggu-7-sapi-mati>.
- Penyakit mulut dan kuku mewabah kembali. (2025, Januari 18). *Kompas*, 5.
- Ravenda, H. (2025, Januari 17). Kerugian akibat penyakit mulut dan kuku diperkirakan tembus Rp40 Triliun. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/ekonomi/kerugian-akibat-penyakit-mulut-dan-kuku-diperkirakan-tembus-rp-40-triliun-1195223>.
- World Organisation for Animal Health. (n.d.). *Foot and mouth disease*. Diakses pada Januari 21, 2025, dari <https://www.woah.org/en/disease/foot-and-mouth-disease/>.